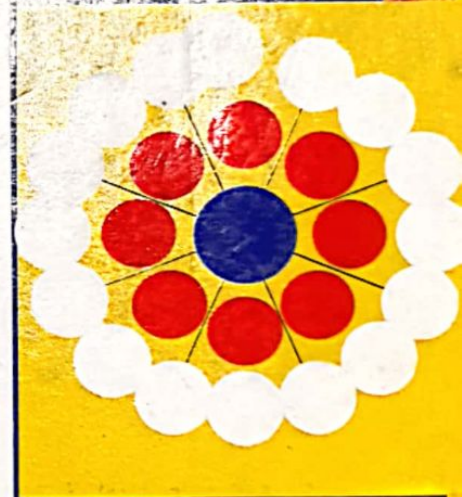


Ibnu Khaldum

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Kartu Pascabayar Telkomsel Di Makassar (*Kamaluddin*), Pengaruh Prinsip Value For Money Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan (*Bachtiar*), Peranan Motivasi Kerja Dalam Kerjasama Kelompok (*Akhmad S*), Administrasi Pemerintahan Daerah Dan Kebijakan Publik Di Daerah (*Saharuddin*), Dependency Theory (Study Administrasi Pemerintahan Negara Dunia Ketiga) (*Haeruddin*), Analisis Keunggulan Komparatif Dan Daya Saing Kain Sutera Di Kabupaten Wajo (*Andi Maslia Tenrisau Adam*), Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pendekatan Total Quality Management (TQM) Di Sekretariat Daerah Gorontalo (*Mochammad Sakir*), Peranan Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Swakarya Di Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara (*Arafat Yanti*), Perencanaan Pembangunan Peternakan Di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (*Ilham Rasyid, Hamid Hoddi, Sitti Nurani Sirajuddin*), Pemberdayaan Peternak Melalui Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (*Muhammad Aminawar Dan Amrullah T*), Peran Peternak Dalam Formulasi Kebijakan Pangan (*Nurjannah Nonci*), Analisis Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Dodol Pembelian Dodol "Monas Jaya" Di Maros (*Luthfi M*), Analisis Pengaruh Fasilitas Layanan Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makasar (*Supiaty*), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar) (*Nurson Petta Pudji*), Makna Dan Nilai Dalam Ungkapan Pada Rambu Solo' (Kajian Hermeneutika) (*Anastasia Baan*), Strategi Pengembangan Agrowisata (Studi Latuppa Agrowisata Palopo) (*Irwani Halid*), Akuntabilitas Pelayanan Publik Kantor Camat Pamona Utara Kabupaten Poso (*Ali Y. Walenta*), Implementasi Kebijakan Pembangunan Pertanian Program Replikasi Sistem Usaha Tani Dan Penggaduhan Ternak Di Kabupaten Konawe (*Akhda*), Peranan Pendidikan Pengelola Zakat Dalam Rangka Penerapan Manajemen Zakat (*H. M. Najib Kasim*), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dikelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng (*Muh. Tang*), Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Solusi Mewujudkan Kota Bersih) (*M. Basir*), Pengelolaan Barang Inventaris Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (*Raja Ali*), Peranan Komunikasi Dalam Organisasi (*A.M. Amien Achmad*), Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo (*Muh. Tahir Hamzah*), Efektivitas Pengelolaan Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wajo (*Muh. Tahir Hamzah*), Analisis Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Daerah Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai (*Hamdin Husin*), Kehidupan Sosial Ekonomi Nelayan Di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau (*Syamsuria*), Pengaruh Kualitas Kayanan Dan Citra Rs Terhadap Kepercayaan Serta Dampaknya Pada Kepuasan Pasien Rumah Sakit Di Propinsi Sulawesi Selatan (*Andi Nadirah Machmud*), Kontribusi Retribusi Pasar Sentral Mamuju Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju (*Haryati*), Adaptasi Orang Sunda Di Makassar (*Jalal*), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan (*Andi Irfan*), Evolusi Penarikan Pajak Daerah Di Indonesia : Suatu Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pajak Daerah Di Indonesia (*Djohariah Sarapa*), Beban Kerja Guru Dan Kualitas Pengelolaan Proses Belajar Mengajar (*Muhlis*)



Volume VI

Edisi ke-3 November 20

KANTOR

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA

WILAYAH IX SULAWESI



**SUSUNAN PENGURUS JURNAL ILMIAH "IBNU KHALDUM"
KOPERTIS WILAYAH IX SULAWESI**

pelindung	:	Koordinator Kopertis Wil IX Sulawesi
pengarah	:	Sekretaris Pelaksanaan Kopertis Wil. IX Sulawesi
penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Syahrir Mallongi, M.Si
panitia Penyunting Ahli	:	1. Prof. Dr. Abu Hamid 2. Prof. Dr. Tahir Kasnawi 3. Prof. Dr. Rabihatun Idris Arif 4. Prof. Dr. Idrus Abustam 5. Prof. Nursadik, MA., Ph. D 6. Dr. Dwia Ariestina NK., MA
penyimpin Umum	:	Dr. Syamsir Torang
redaksi Pelaksana	:	1. Dr. Syamsir Torang 2. Dr. Siardin A. Djemma, M.Si 3. Dr. Agussalim Munada, M.Si 4. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si 5. Dr. Hamid
ata Usaha	:	1. Andi Makmur, SH 2. David Hamid 3. Dra. Hj. Nuraeni Daud 4. Syahrudin K, SE

DAFTAR ISI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Kartu Pascabayar Telkomsel Di Makassar	1
Kamaluddin	
Pengaruh Prinsip Value For Money Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan	7
Bachtiar	
Peranan Motivasi Kerja Dalam Kerjasama Kelompok	16
Akhmad S	
Administrasi Pemerintahan Daerah Dan Kebijakan Publik Di Daerah	22
Saharuddin	
Dependency Theory (Study Administrasi Pembangunan Negara Dunia Ketiga)	30
Haeruddin	
Analisis Keunggulan Komparatif Dan Daya Saing Kain Sutera Di Kabupaten Wajo	39
Andi Maslia Tenrisau Adam	
Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pendekatan Total Quality Management (TQM) Di Sekretariat Kota Gorontalo	46
Mochammad Sakir	
Peranan Wanita Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara	56
Arafat Yasir	
Proses Perencanaan Pembangunan Peternakan Di Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru	66
Ilham Rasyid, Hamid Hoddi, Sitti Nurani Sirajuddin	
Pemberdayaan Peternak Melalui Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	72
Muhammad Aminawar Dan Amrullah T	
Peran Pemerintah Dalam Formulasi Kebijakan Pangan	79
Nurjannah Nonci	
Analisis Kualitas Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Dodol Pembelian Dodol "Monas Jaya" Di Maros	85
Mochtar Luthfi M	
Analisis Pengaruh Fasilitas Layanan Pasar Terhadap Pungutan Retribusi Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makasar	94
Suplati	
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar)	108
Nurson Petta Pudji	
Makna Dan Nilai Dalam Ungkapan Pada Rambu Solo' (Kajian Hermeneutika)	118
Anastasia Baan	

PERAN PEMERINTAH DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PANGAN

Nurjannah Nonci

Abstrak

Dalam suatu pemerintahan, peran negara dalam bidang ekonomi politik, merupakan usaha pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang mengatur produsen, konsumen dan peran pasar. Khususnya peran dalam bidang pangan tidak mencukupi kebutuhan akan konsumsi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, beras dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan politik.

Berdasarkan fakta itu, hendaknya pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat mengontrol harga, dengan menstabilkan antara kebutuhan nasional dengan kepentingan rakyat khususnya kepentingan petani, sehingga tidak menimbulkan gejolak politik. Dengan demikian kebijakan yang populis harus dianalisis dengan baik, menentukan agenda masalah dengan berdasarkan variabel-variabel yang mendukung. Seperti dukungan institusi pertanian, inovasi IPTEK, PERBANKAN, keterampilan dan motivasi petani, kontrol stabilitas harga padi, pada akhirnya implementasi kebijakan tersebut dapat mewujudkan welfare state.

PENDAHULUAN.

Negara mempunyai fungsi yang sangat beragam, mulai dari yang baik, hingga yang buruk, kekuasaan untuk memaksa, yang memungkinkan mereka melindungi hak milik pribadi dan menciptakan keamanan public, juga memungkinkan mereka mengambil alih hak milik pribadi dan melanggar hak-hak warga Negara mereka. Monopoli kekuasaan yang dijalankan Negara memungkinkan individu-individu melepaskan diri dari apa yang disebut oleh Hobbes sebagai "perang setiap manusia melawan setiap manusia" dalam negeri, namun menjadi dasar bagi konflik dan perang pada tataran internasional. Dengan demikian, tugas politik modern adalah menjinakkan kekuasaan Negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum (Fukuyama, 2005).

Birokrasi pemerintahan merupakan peran Negara yang berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus menerus kepada pemerintah. Masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari pemenuhan kebutuhan,

pelaksanaan sampai pada penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang bersifat strategis.

Peran Negara dalam bidang ekonomi semakin dibahas dalam khasanah literatur ekonomi politik karena mekanisme pasar dan transaksi ekonomi tidak terjadi di ruang yang vakum. Di dalam ekonomi ada nuansa sosial, budaya, kelembagaan dan politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar yang terbentuk dan transaksi ekonomi yang terjadi. Negara atau birokrasi adalah sebuah entitas kelembagaan yang paling dominan dan sangat berpengaruh dalam kehidupan ekonomi (Rachbini D.2002).

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah, bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya dibutuhkan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika suatu rezim tertentu tidak dapat diandalkan untuk melaksanakan proses pembangunan secara kompeten dan jujur, rezim tersebut akhirnya akan dipaksa untuk melakukannya karena tekanan politis yang semakin keras, atau rezim tersebut akan kehilangan kekuasaannya, mungkin melalui PEMILU,

atau dengan cara lain (Todaro M.P, Smith S.C 2002)

Pelayanan public pada bidang pangan, khususnya padi atau beras merupakan suatu program yang sangat urgen bagi rakyat Indonesia. Karena beras merupakan kebutuhan pokok, dan salah satu unsur dari sembako adalah beras. Beras terkait dengan masalah nasional, misalnya, jika beras tidak cukup stoknya untuk memenuhi kebutuhan nasional, harga beras tidak terjangkau oleh masyarakat marginal, dan petani tidak bisa panen atau gagal panen. Maka masalah ini akan mempengaruhi secara signifikan perkembangan pembangunan nasional. Sampai saat ini, padi atau beras masih dipersepsikan sebagai komoditas strategis, dan tetap mendapat prioritas tinggi dalam program pembangunan nasional. Oleh sebab itu, beras dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, dan bahkan dapat mempengaruhi perkembangan politik.

Hasil pembangunan pertanian selama tiga dasawarsa yang lalu dan dampak dari krisis ekonomi, meyakinkan kita bahwa sektor pertanian telah mampu berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan serta memantapkan ketahanan pangan nasional. Jika kita membahas kembali tentang pembangunan pertanian selama tiga dasawarsa yang lalu, nampak bahwa pada era praswasembada beras, dukungan politik pemerintah terhadap pembangunan pertanian sangat kuat. Dukungan tersebut diimplementasikan dalam tiga strategi utama pembangunan pertanian menurut skala prioritasnya seperti yang dikemukakan oleh (Faisal K, et all ,73,2004) antara lain adalah intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi.

Adanya partisipasi masyarakat, baik keterlibatannya dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melalui program-program pembangunan pemerintah yang menyentuh segala aspek dan kebutuhan hidupnya, seperti pendidikan, kesehatan, moral, spiritual, sosial, politik, pertanian. Sehingga pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga pada tataran kemajuan suatu bangsa

dan negara. Ketika kesejahteraan masyarakat sudah terpenuhi, tentunya hal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan Negara, yaitu pelayanan public pemerintahan yang dicita-citakan oleh bangsa dan negara.

Fenomena Beras dan pengaruh politik.

Secara nasional, sekitar 45% konsumsi kalori dan 45% konsumsi protein tingkat rumah tangga berasal dari beras. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran produksi beras berperan penting dalam pemenuhan kecukupan konsumsi rumah tangga dan ketahanan nasional. Sekitar 90% produksi beras dihasilkan dari sawah terutama di Jawa. Akibat lahan yang lebih subur, jaringan irigasi yang lebih tersedia, dan teknologi pertanian yang lebih maju disbanding dengan daerah lain, maka Jawa memiliki peranan penting dalam produksi padi nasional. Selama tiga dasawarsa terakhir, Jawa rata-rata menyumbang 55-63% terhadap produksi padi nasional (Irawan B, 2004).

Masalah padi merupakan masalah yang penting dalam pembangunan pertanian nasional. Petani merupakan salah satu elemen yang sangat penting yang mendukung terwujudnya produksi padi. Disinilah peran petani yang sangat penting untuk meningkatkan produksi padi, dan petani dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani. Namun ironisnya, buruh tani tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi mereka sehari-hari, yakni dengan memeras tenaga untuk meningkatkan produksi padi, pendapatannya masih sangat relatif rendah sehingga nasib petani tidak pernah berubah hingga sekarang, yakni hasil yang diperoleh, sebatas hanya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Petani menikmati hasil kerja kerasnya, hasilnya belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejahtera.

Produktivitas diukur dengan indikator antara lain; (1) tingkat produksi; (2) variabilitas produksi; (3) produktivitas antar kabupaten/terdaerah kecenderungan:

1. Produktivitas meningkat dari rata-rata 3t/ha pada tahun 1972-1975 menjadi sekitar 5,2 t/ha Tahun 1996-2000.
2. Keragaman produktivitas antar kabupaten mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh Turunnya koefisien variasi produktivitas dari 17,4% pada tahun 1972-1975 menjadi 6,8% Tahun 1996-2000. Karena sebagian besar pendapatan petani di Jawa berasal dari usahatani padi sawah.
3. Variabilitas produktivitas padi cenderung turun dari 8,71% pada tahun 1972-1975 menjadi 4,45% tahun 1996-2000. Ini menunjukkan bahwa ketidak pastian produktivitas padi sawah akibat faktor non teknis-agronomis seperti harga masukan dan keluaran serta iklim semakin kecil. Hal ini disebabkan karena adanya pengendalian harga oleh pemerintah dan meningkatnya kemampuan adaptasi petani terhadap kondisi agroklimat setempat (Anderson dan Hazeli dalam Irawan B, 2004).

Akhir- akhir ini masalah beras menimbulkan fenomena yang menarik. Dengan berbagai masalah yang dihadapi, baik secara nasional, maupun lokal. Misalnya berdasarkan asumsi, bahwa stok beras yang tersedia sekarang tidak mencukupi kebutuhan nasional. Sehingga perlu mengimport beras dari luar negeri. Selanjutnya, kebijakan itu sejalan dengan kebijakan pasar bebas, yang merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan dari organisasi-organisasi internasional (IMF, World bank) bagi Negara dunia ketiga yang butuh bantuan dana, untuk membangun negaranya.

Disisi lain kebijakan tersebut justru memberikan peluang bagi Negara-negara pengekspor beras untuk memperdagangkan berasnya dengan harga yang murah. Sehingga dampaknya meresahkan bagi petani, karena harga beras lokal lebih mahal, jika dibandingkan dengan harga beras import. Akibatnya beras petani kurang laku di pasar. Dengan persaingan itu petani terpaksa menjual beras dengan harga murah, dan nilai jual beras lokal, tidak seimbang dengan biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh petani.

Sehingga petani rugi dengan adanya kebijakan itu.

Faktor lain yang menyebabkan masalah itu, adalah peran Bulog sebagai institusi yang mengatur harga dan pendistribusian beras, namun sayangnya kinerja Bulog yang tidak bagus, misalnya tidak mempunyai unit kerja dalam institusinya, yang menangani tentang, bagaimana usaha petani untuk bisa meningkatkan kualitas gabah agar bisa bersaing di pasar. Bahkan di beberapa daerah, peran tengkulak mempengaruhi harga gabah. Gabah yang dijual petani ke tengkulak dengan harga yang relatif rendah, kemudian tengkulak menjual gabah itu ke Bulog. Petani menjual gabah kepada tengkulak karena faktor kebutuhan yang mendesak. Sehingga harga cenderung ditentukan oleh tengkulak. Akibatnya, nilai jual rendah karena ditentukan oleh tengkulak dalam bentuk gabah kering panen.

Disatu sisi petani kurang terampil, dan motivasinya rendah. Mereka bertani tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, petani cepat puas dengan hasil yang didapatkan. Jika ada sisa dari persediaan untuk konsumsinya sehari-hari, maka sisa itu yang dijual. Di daerah, penyuluh pertanian masih kurang memberi informasi tentang pengelolaan pasca panen.

Keberpihakan pemerintah kepada petani, masih perlu dipertanyakan, misalnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terkesan setengah hati dan tidak konsisten, terutama menyangkut penyaluran kredit di sektor pertanian. Petani kesulitan mendapatkan dana kredit karena syarat jaminan berupa sertifikat tanah tidak mudah mereka penuhi (Kompas, 29, juli, 2011).

Dalam upaya peningkatan produksi padi nasional untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, relatif sulit tercapai, karena petani sebagai pengguna teknologi, kurang mendapatkan informasi tentang inovasi teknologi baru yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian pangan, khususnya beras. Hal tersebut disebabkan karena, alur informasi dari sumber ke pengguna terlalu panjang birokrasinya. Misalnya IPTEK atau hasil penelitian dari PUSLITBANGTAN (Pusat Penelitian dan

Pengembangan Tanaman Pangan), selanjutnya ke BPTP (Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian) di tingkat propinsi, kemudian, ke penyuluh dan terakhir adalah ke pada pengguna atau petani.

Birokrasi itu seyogyanya diperpendek, agar informasi yang dibutuhkan petani bisa lebih cepat. Salah satu usinya adalah, dengan cara memberi peluang BPPT kerjasama dengan pemda tingkat II SKPD. Agar teknologi yang dihasilkan langsung tiba ke pengguna. Begitu pula Meningkatkan frekuensi sosialisasi hasil penelitian oleh LITBANG yang bekerjasama dengan penyuluh pertanian.

Analisis kebijakan tentang padi (beras)

Argumen yang dikemukakan oleh Suryana A, dan Hermanto (55, 2004) sebagai berikut Instrumen kebijakan untuk memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional meliputi : (1) pengembangan infrastruktur untuk mendukung usaha tani padi; (2) peningkatan akses petani terhadap sarana produksi dan sumber permodalan ;(3) peningkatan mutu intensifikasi usahatani padi dengan menggunakan teknologi maju, (4) ekstensifikasi lahan pertanian di lahan kering, rawa pasang surut, lebak, dan daerah bukan baru; dan (5) peningkatan akses petani terhadap sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran.

Sejalan dengan dinamika politik, ekonomi dan sosial, serta keterbatasan pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan, secara bertahap dilakukan reorientasi kebijakan program intensifikasi dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha agribisnis, mengingat kebijakan program intensifikasi dalam era otonomi daerah memerlukan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Koordinasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efisien, efektif dan sinergi dalam memberikan pelayanan public (Pantjar S, I Wayan S 2004).

Dalam menumbuhkan pembangunan pertanian, juga diharapkan timbul dari masyarakat, khususnya pelaku intensifikasi yang bisa melihat peluang-peluang untuk

meningkatkan produktivitas, terutama bentuk kerja sama, kemitraan, atau bentuk kerja sama lainnya antara petani/kelompok tani dan pelaku agribisnis akan berjalan berkelanjutan apabila didasarkan kepercayaan, keadilan dan tentang pentingnya pembangunan sebagai tanggung jawab Sementara itu pemerintah pusat menciptakan kebijakan makro yang dan berpihak kepada petani, kebijakan tarif dan normatif, eksp modal kredit, pengamanan harga, serta fiskal.

Kebijakan perberasan pada orde baru diarahkan untuk meraih nasional yang setinggi-tingginya rangka mencapai dan memper swasembada beras. Obsesi pada (Presiden Soeharto) Yang sangat untuk meraih tujuan tersebut pemerintah pusat sebagai kekuatan yang tidak boleh ditandingi, maka sumber dukungan politik yang luar biasa upaya peningkatan produksi beras kondisi seperti itu, dukungan anggaran pemerintah pun melimpah. Secara umum, peningkatan produksi merupakan komitmen dari pemerintah membuat suatu sistem yang lebih baik didukung oleh seluruh eksponen baru

Berbeda kondisi saat ini keberpihakan pemerintah kepada masih perlu dipertanyakan, kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan petani, peran birokrasi, peran Bank perbankan dalam menyalurkan Kredit Rakyat (KUR), terkesan setengah tidak konsisten,

Masalah-masalah itu agenda dalam membuat kebijakan. melahirkan beberapa pertanyaan, kebijakan itu berdampak baik kepada maupun kepada masyarakat bawah? Apakah harga dan kualitas pasaran dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah? Apakah harga beras tidak terlalu jauh perbedaannya dengan lokal, agar petani tidak dirugikan hadirnya beras import? Masalah-masalah menjadi agenda dalam membuat kebijakan Jawabannya adalah bergantung pada dan peran Negara dalam political will

ini implementor, dalam mengimplementasikan kebijakan, yang harusnya berpihak kepada kepentingan kebutuhan rakyat, kepada warganya yang tidak lain adalah mengusahakan wujudnya welfare state.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik terdiri dari; (1) perumusan masalah, memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkanumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah, dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda; (2) mulasi kebijakan yakni peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif termasuk melakukan sesuatu; (3) adopsi kebijakan atau rekomendasi membuah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya dimasa mendatang akan diestimasi melalui peramalan, membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian; (4) Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya, hal ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi; (5) penilaian kebijakan membuah pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Hal ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah (Dunn W.N, 2003).

Berdasarkan kenyataan itu, kebijakan tentang padi atau beras yang akan diformulasikan dan diimplementasikan kepada target group, hendaknya dapat menjadi solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi rakyat. Dengan demikian dalam membuat kebijakan akan melibatkan implementor yang akan mengidentifikasi, menentukan masalah yang akan menjadi

agenda kebijakan, dalam hal ini menetapkan beberapa masalah pangan khususnya beras, selanjutnya, dibuat formulasinya, mengestimasi jika kebijakan akan diimplementasikan, menganalisis dampak dari implementasi kebijakan, mengevaluasi kebijakan kepada target group.

Bertitik tolak dari beberapa agenda permasalahan, disertai dengan komitmen yang tinggi dari semua aktor, maka kebijakan produksi beras dapat dilakukan secara besar-besaran. Variabel-variabel kebijakan dapat dibagi menjadi enam, yaitu; (1) transformasi dan reformasi kelembagaan, pembangunan lahan dan irigasi; (2) meningkatkan motivasi dan keterampilan petani; (3) inovasi teknologi penyediaan sarana produksi; (4) perbankan yang memfasilitasi dengan kredit lunak; (5) pengembangan usaha jasa alat dan mesin pertanian (alsintan), memfasilitasi dalam bentuk kerja sama dengan pihak swasta; (6) mengimport beras satu bulan sebelum waktu panen tiba, dan dua bulan sesudah panen. ketersediaan pupuk yang harganya terjangkau oleh petani, dan pemerintah meningkatkan harga subsidi, kebijakan dengan sistem sentralistik.

KESIMPULAN

Dalam suatu pemerintahan, Negara memegang peranan yang sangat penting, misalnya peran Negara dalam bidang ekonomi politik, merupakan usaha pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi yang mengatur produsen, konsumen dan peran pasar. Khususnya peran dalam bidang pangan perberasan, dengan adanya fenomena yang terjadi bahwa, stok nasional beras tidak mencukupi kebutuhan akan konsumsi rakyat Indonesia. Atas pertimbangan tersebut sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengimport beras dari luar negeri. Kebijakan itu sejalan dengan kebijakan pasar bebas. Karena hal tersebut merupakan salah satu persyaratan dari organisasi-organisasi internasional (IMF, World bank) bagi Negara dunia ketiga yang butuh bantuan dana untuk pembangunan.

Masuknya beras import ke Indonesia menimbulkan masalah bagi petani. Adapun masalah tersebut antara lain adalah harga

beras import lebih murah, jika dibandingkan dengan harga beras lokal, jadi di pasaran beras lokal tidak mampu bersaing dengan beras import, akibatnya petani jadi rugi karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada hasil produksi. Peran Bulog tidak mampu mengatur harga, pendistribusian, dan sosialisasi teknologi kepada petani. Birokrasi mulai dari PUSLITBANGTAN sebagai penghasil IPTEK sampai ke tangan pengguna tidak efisien. Demikian halnya dengan kinerja penyuluh tidak ditingkatkan, sebagai aparat yang melayani petani. Beras terkait dengan masalah nasional, misalnya, jika harga beras tidak terjangkau oleh masyarakat marginal, dan petani tidak bisa panen atau gagal panen. Maka masalah ini akan mempengaruhi secara signifikan perkembangan pembangunan nasional. Sampai saat ini, padi atau beras masih dipersepsikan sebagai komoditas strategis,

dan tetap mendapat prioritas tinggi dalam program pembangunan nasional. Oleh karena itu, beras dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian, dan dapat mempengaruhi perkembangan

Berdasarkan fakta itu, pemerintah membuat suatu kebijakan dapat mengontrol harga, menstabilkan antara kebutuhan dengan kepentingan rakyat, kepentingan petani, sehingga menimbulkan gejolak politik. Demikian kebijakan yang populer dianalisis dengan baik, menentukan masalah dengan berdasarkan variabel yang mendukung. Seperti institusi pertanian, inovasi PERBANKAN, keterampilan dan petani, kontrol stabilitas harga padi, akhirnya implementasi kebijakan dapat mewujudkan welfare

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn WN;2003;Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi2 (Penerjemah Samudra);Gajah Mada University Press; 2003; Jakarta.
- Faizal.I.dkk;2004;Ekonomi Padi dan Beras Indonesia;BALITBANG PERTANIAN Jakarta.
- Fukuyama F; 2005; Memperkuat Negara (penerjemah A.Zaim R);Kerjasama Kedokteran dan PT Gramedia, Jakarta.
- Hermanto S;2006; Jurnal Penelitian Pertanian Tanaman Pangan;PUSLITBANGTAN, Bogor.
- Rachbini D. 2002;Ekonomi Politik;Paradigma dan Teori Pilihan Publik; Galia; Jakarta.
- Todaro MP, Smith SC;2005;Pembangunan Ekonomi edisi 2 (penerjemah AndryY);Jakarta.
- Pantjar.SI,2006;Prosiding Simposium Tanaman Pangan; PUSLITBANGTAN,Bogor.
- Kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan Standisasi Bidang Pertanian;DEPTAN;Jakarta.
- Kompas, 29 Juli,20011.